

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena globalisasi membuahakan sumber daya manusia yang menunjukkan banyak perubahan, maka daripada itu dalam menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini, setiap individu dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, adapun salah satu cara untuk mewujudkannya yakni melalui jalur pendidikan. Oleh karenanya pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sebagaimana menurut John Dewey dalam Syaiful Sagala (2012, hlm. 3) bahwa 'Pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya'. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka sudah menjadi kewajiban semua pihak, baik pemerintah, para pendidik dan masyarakat untuk senantiasa bahu-membahu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pada dasarnya, pendidikan bertujuan untuk membentuk seseorang menjadi manusia ideal, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pada Pasal 3, yaitu:

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, maka sosok manusia ideal yang diharapkan dapat terbentuk antara lain adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berbudi pekerti luhur, cerdas, berperasaan, berkemauan, mampu berkarya, dan sadar apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut, disusun standar pendidikan nasional, hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

NUR ENDAH APRILIYANI, 2014

Kinerja Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perencanaan Dan Proses Pembelajaran Di SMP Negeri 1 Campaka Kabupaten Purwakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa “Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Standar nasional pendidikan mencakup tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Berkaitan dengan hal di atas, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam hal ini, standar proses merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi lulusan. Maka daripada itu, guru dalam pelaksanaan pembelajaran haruslah mengacu pada standar proses.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, peranan guru sangat menentukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, karena guru merupakan agen pembelajaran yang menyelenggarakan proses pembelajaran, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa guru adalah “Tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai pendidik, seorang guru memiliki tugas diantaranya harus mampu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai hasil pembelajaran dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, guru dituntut memiliki kemampuan dalam merekayasa pembelajaran, sebagaimana menurut Barnawi dan Mohammad Arifin (2012, hlm. 90) bahwa “Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru sebagai perekayasa pembelajaran ialah mampu menyusun desain pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran”. Dari uraian tersebut, kemampuan guru dalam merekayasa pembelajaran berkaitan erat dengan penyusunan desain pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan perencanaan pembelajaran yang telah dibuatnya.

Berkaitan dengan kegiatan penyusunan desain pembelajaran, dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses dijelaskan bahwa “Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi”. Maka, pelaksanaan pembelajaran didahului dengan penyiapan RPP yang dikembangkan oleh guru baik secara individual maupun kelompok yang mengacu pada silabus.

Lebih lanjut, dalam Lampiran IV Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, ditegaskan bahwa:

Tahap pertama dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Tahapan kedua dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Berdasarkan pemaparan di atas, pentingnya kemampuan guru dalam hal merencanakan pembelajaran, yakni sebagai suatu tindakan merencanakan lingkungan untuk menerapkan kaidah-kaidah ilmu pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa agar belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kinerja guru dalam hal merencanakan dan melaksanakan pembelajaran menjadi faktor utama dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, terdapat bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berusaha membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian Pancasila, sebagaimana yang dikemukakan oleh Numan Soemantri (2001, hlm. 279) bahwa “Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati.” Rumusan tersebut tentunya berperan penting bagi pelaksanaan bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan, yakni sebagai salah satu mata pelajaran yang terdapat disetiap jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

Dalam proses kegiatan belajar dan mengajar bidang studi PKn, peserta didik diharapkan memiliki kecakapan tidak hanya sebatas tingkatan pengetahuannya saja, namun juga pada tingkat perubahan sikap dan perilaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Indonesia (2013) menjelaskan tentang konsep pendekatan *scientific* dalam pembelajaran, yaitu:

Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.” Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa”. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (*soft skills*) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (*hard skills*) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Dari penjabaran di atas, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara akhir, namun proses pembelajaran dipandang sangat penting. Oleh karena itu, pembelajaran *scientific* wajib dilakukan pada pembelajaran PKn dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu menjadikan warga negara yang baik (*to be a good citizenship*) dan membentuk manusia Indonesia yang memiliki karakteristik pendidikan kewarganegaraan, diantaranya pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak-watak kewarganegaraan (*civics disposition*).

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan afektif yang didalamnya mengandung unsur-unsur nilai, sikap, minat, serta norma. Karenanya sudah menjadi kewajiban guru PKn untuk membina nilai dan moral siswa agar sikap dan perilakunya selaras dengan ideologi bangsa Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa guru merupakan komponen terpenting dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, guru merupakan tokoh kunci di sekolah agar terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas dan guru dianggap sebagai figur yang penting dalam penentu keberhasilan peserta didik, utamanya dalam kegiatan proses belajar dan mengajar.

Dengan setumpuk tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya itu, seorang guru harus berupaya secara optimal menunjukkan bahwa dia mampu menghasilkan kinerja yang baik demi terciptanya pendidikan yang bermutu. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara lengkap dan sistematis, selain itu guru harus menguasai berbagai macam strategi dan pendekatan serta model pembelajaran agar dapat menggairahkan motivasi belajar peserta didik sehingga proses belajar mengajar berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan.

Namun yang terjadi di lapangan, dengan merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru PKn di SMP Negeri 1 Campaka, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, diantaranya penyampaian bahan ajar masih bersifat verbalisme, kemampuan guru dalam mengaplikasikan bahan ajar melalui pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi masih belum optimal, kemudian guru masih mengalami kesulitan dalam mengelola kelas terutama menjaga konsentrasi siswa agar tetap fokus saat proses belajar mengajar berlangsung pada siang hari utamanya setelah jam istirahat, selain itu pengaturan alokasi waktu saat proses pembelajaran di kelas yang terkadang kurang terkontrol sehingga berdampak pada belum maksimalnya guru melakukan evaluasi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Melihat pemaparan di atas, pada kenyataannya lembaga pendidikan formal utamanya pada tingkat pendidikan menengah tidak terlepas dari masalah kinerja guru dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, serta dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya persoalan dalam kegiatan belajar mengajar yang didominasi oleh guru, seperti yang dikemukakan oleh Kunandar (2007, hlm. 249) bahwa “Proses

pembelajaran berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah menjadi pilihan utama strategi pembelajaran”. Tentunya jika hal tersebut terus terjadi, maka pembelajaran akan terasa membosankan bagi siswa.

Selain hal di atas, penilaian pembelajaran pada dasarnya merupakan bagian yang integral dari keseluruhan proses belajar mengajar, sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, bahwa:

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assessment*) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*) dari pembelajaran.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, digunakannya pendekatan penilaian otentik oleh guru agar dapat menilai proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan, karena pada dasarnya penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran. Jadi, kegiatan penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya sebagai cara untuk menilai keberhasilan siswa dalam menguasai materi pembelajaran saja atau guru melaksanakan penilaian bukan hanya berdasarkan hasil ulangan saja.

Berdasarkan pada uraian di atas, diperlukan perubahan pola pikir guru, dari pola pikir tradisional menuju pola pikir profesional. Guru profesional akan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dan penilaian yang menyenangkan bagi siswa dan guru, sehingga dapat mendorong tumbuhnya kreativitas belajar pada diri siswa.

Guru berada di posisi terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Guru berhadapan secara langsung dengan para peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. Ditangan gurulah nantinya akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik dalam hal akademis, *skill*, kematangan emosional, dan moral serta spiritual. Oleh karena itu diperlukan sosok guru yang memiliki kompetensi dan pengabdian yang tinggi dalam menjalankan tugas

profesionalnya, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan kompetensi setiap guru itu wajib, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1), menjelaskan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: “Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional”. Keempat kompetensi tersebut tentunya harus dimiliki dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi guru agar memiliki kinerja yang tinggi, karena jika hal tersebut dapat tercapai, maka dapat dipastikan sumber daya manusia di Indonesia, utamanya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa secara perlahan kualitasnya pun akan meningkat. Sehingga terciptalah bangsa yang cerdas juga siap menghadapi tantangan-tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dan yang terjadi di tengah arus globalisasi seperti saat ini maupun di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan pendidikan salah satunya ditentukan oleh kinerja guru, hal ini menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian serius dalam dunia pendidikan. Guru mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup berat, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan peserta didiknya tetapi juga melaksanakan tujuan instansinya, dan guru yang profesional merupakan kunci keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk memilih judul **“KINERJA GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERENCANAAN DAN PROSES PEMBELAJARAN DI SMP NEGERI 1 CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi bahwa terdapatnya persoalan guru terkait dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, yakni dalam hal pemilihan dan penentuan media, metode, dan strategi pembelajaran yang tepat dalam

mengembangkan materi pembelajaran, serta teknik penilaian yang digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa. Agar menjaga penelitian ini fokus dan terarah dari pokok permasalahan, maka penulis merumuskan sub-sub masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kinerja guru PKn dalam merencanakan pembelajaran di SMP Negeri 1 Campaka?
- b. Bagaimana kinerja guru PKn dalam menerapkan rencana pembelajaran di SMP Negeri 1 Campaka?
- c. Bagaimana kinerja guru PKn dalam menilai proses dan hasil pembelajaran di SMP Negeri 1 Campaka?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara aktual dan faktual mengenai sejauh mana kinerja guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam perencanaan dan proses pembelajaran.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai :

- a. Kinerja guru PKn dalam merencanakan pembelajaran di SMP Negeri 1 Campaka.
- b. Kinerja guru PKn dalam menerapkan rencana pembelajaran di SMP Negeri 1 Campaka.
- c. Kinerja guru PKn dalam menilai proses dan hasil pembelajaran di SMP Negeri 1 Campaka

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada dasarnya dapat diperoleh setelah melalui kegiatan penelitian, apabila dalam penelitian berhasil, maka penelitian memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan serta meningkatkan khasanah pengetahuan bagi kalangan akademis sehingga dapat memberikan sumbangsih dan memperkaya teori-teori tentang bagaimana kinerja guru Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat:
 - a. Memberikan gambaran secara faktual dan akurat tentang sejauh mana kinerja guru PKn di SMP Negeri 1 Campaka dalam perencanaan dan proses pembelajaran.
 - b. Memberikan masukan kepada para pendidik, khususnya guru bidang studi PKn di SMP Negeri 1 Campaka dalam kegiatan perencanaan dan proses pembelajaran.
 - c. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi sekolah-sekolah dalam melaksanakan segala kebijakannya yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan dan proses pembelajaran.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi berisi rincian tentang urutan penulisan pada setiap bab, adapun dalam skripsi ini terdiri atas lima bab dengan urutan sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bagian awal penulisan skripsi, yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

2. Bab II Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki peranan penting, yakni sebagai landasan teoritik dalam analisis temuan. Pada bab ini dipaparkan mengenai teori dan konsep tentang kinerja guru, pendidikan kewarganegaraan, perencanaan pembelajaran, dan proses pembelajaran yang efektif.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai pertimbangan dalam melakukan metodologi penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini memuat dua hal utama yaitu pengolahan atau analisis data dan pembahasan atau analisis temuan, yakni memaparkan tentang deskripsi terhadap lokasi penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan penelitian, yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian dan saran. Peneliti memberikan kesimpulan terhadap beberapa pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dan saran diberikan oleh penulis sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan baik di lapangan maupun secara teoritis.